



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 41/I/2020**

TENTANG

**PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 117);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berwenang dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
2. Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. Meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/ atau Pengurus Barang Pembantu;
4. Menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
5. Mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
7. Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/ atau Pengurus Barang Pembantu;
8. Memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
9. Meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruang (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
10. Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah;
11. Meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/ atau Pengurus Barang Pembantu

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Watansoppeng,
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI SOPPENG



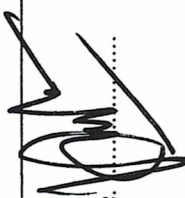
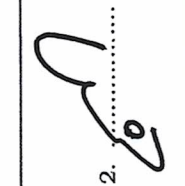
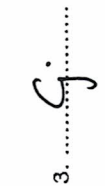
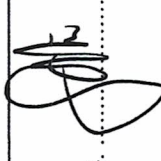
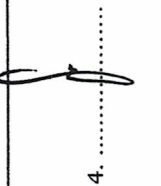
A. KASWADI RAZAK

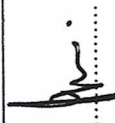
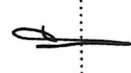
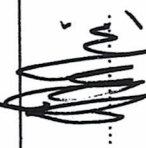
Tembusan :

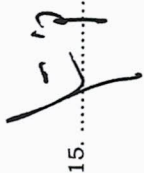
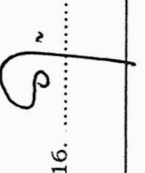
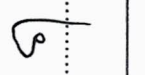
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Kepala Wilayah VII Perwakilan BPK-RI di Makassar.
5. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
6. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Soppeng di Watansoppeng.
7. Arsip.

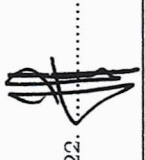
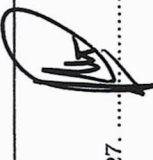
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 41/I/2020
TANGGAL : 6 JANUARI 2020

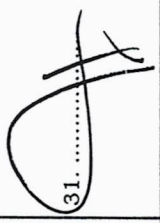
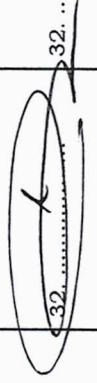
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	UNIT KERJA	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	KEWENANGAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	6	7
1	SEKRETARIAT DAERAH	1 Drs. MUHAMMAD TANG NIP. 19661231 200604 1 121 Penata Tk. I (III / d)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	1. 	1. 
2	SEKRETARIAT DPRD	2 HAMDAN TAUFAN, SE, MM NIP. 19730327 201001 1 003 Penata (III / c)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	2. 	2. 
3	INSPEKTORAT DAERAH	3 CAEZAR JAZULI, S.Sos, M.Adm.SDA NIP. 19770214 200604 1 007 Penata Tk. I (III / d)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	3. 	3. 
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4 FATIMAH, S.Pd, MM NIP.19770511 200502 2 003 Penata (III / c)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	4. 	4. 
5	DINAS KESEHATAN	5 HASNAWATI, S.Sos NIP. 19680715 199103 2 012 Penata (III / c)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	5. 	5. 

1	2	3	4	6	7
6	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	6 ROSLINDA, SP NIP. 19800903 200604 2 014 Penata Tk. I (III / d)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	6..... 	6..... K
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7 Hj. NURHAYATI. T, S.Sos NIP.19690803 199003 2 010 Penata Tk. I (III / d)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	7..... 	7..... 
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8 ROSMINI, SE, MM NIP. 19720720 199603 2 006 Penata Tk. I (III / d)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	8..... 	8..... 
9	DINAS PERHUBUNGAN	9 Drs. HASANUDDIN NIP.19641227 199202 1 002 Pembina Tk. I (IV / b)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	9..... 	9..... 
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10 ISMAIL, SP, M.Si NIP. 19690821 200801 1 016 Penata (III / c)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	10..... 	10..... 
11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11 FATMAWATI, SE. MM NIP. 19741215 200212 2 007 Penata Tk. I (III / d)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	11..... 	11..... 
12	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	12 EDIANTO, SP NIP.19821213 201001 1 017 Penata (III / c)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	12..... 	12..... 
13	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	13 Hj. NURHAYANI, S.Sos NIP. 19710815 199403 2 011 Penata Tk. I (III / d)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	13..... 	13..... 

1	2	3	4	6	7
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	14 TAMRIN, S.Sos NIP. 19701231 199303 1 031 Penata Tk. I (III / d)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	14. 	14. 
15	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	15 NURUL IFDHAL ANAS, SS NIP. 19830310 201101 2 010 Penata (III / c)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	15. 	15. 
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16 HASTATI NIP. 19621207 198603 2 011 Penata Tk. I (III / d)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	16. 	16. 
17	DINAS SOSIAL	17 I.J. NURHAYATI, S.Sos NIP. 19700409 199303 2 005 Penata Tk. I (III / d)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	17. 	17. 
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18 SURIANI, S.Sos, MM NIP. 19690601 200701 2 028 Penata Tk. I (III / d)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	18. 	18. 
19	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	19 Hj. SUMIATI, SE NIP. 19631028 198503 2 008 Penata Tk. I (III / d)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	19. 	19. 
20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20 Dra. Hj. HAMIAH NIP. 19641231 199003 2 062 Pembina (IV / a)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	20. 	20. 
21	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	21 ANDI HASLINDAH, SE, M.Si NIP. 19670928 199603 2 002 Pembina (IV / a)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	21. 	21. 

1	2	3	4	6	7
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	22 HASNIAWATI, SE, MM NIP. 19780812 200901 2 003 Penata (III / c)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	22. 	22. 
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	23 NURDALIAH NUR, S.Sos, M.Si NIP. 19770914 201101 2 006 Penata (III / c)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	23. 	23. 
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24 H. AHMAD MASYKUR, S.Ag, MH NIP. 19730617 200901 1 008 Penata (III / c)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	24. 	24. 
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25 HARDIANINGSI, SE, M.Si NIP. 19860223 200502 2 002 Penata (III / c)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	25. 	25. 
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	26 SYAMSURIAH, S.Sos NIP. 19640427 199203 1 009 Penata Tk. I (III / d)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	26. 	26. 
27	KECAMATAN LALABATA	27 RUTDAMAYANTI, SE NIP. 19801011 201002 2 025 Penata Muda Tk. I (III / b)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	27. 	27. 
28	KECAMATAN LILIRILAU	28 HASRUDDIN JAMARDIN, S.Sos NIP. 19831114 201001 1 019 Penata Muda Tk. I (III / b)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	28. 	28. 
29	KECAMATAN LILIRIAJA	29 AFRIANTO, SH NIP. 19830410 201101 1 014 Penata (III / c)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	29. 	29. 

1	2	3	4	6	7
30	KECAMATAN MARIORAWO	30 ANDI HASRIULIH, S.Kom NIP. 19800216 201001 2 001 Penata (III / c)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	30. 	30. 
31	KECAMATAN MARIORIAWA	31 HAMRIADI, SE NIP. 19790113 201001 1 014 Penata Muda (III / a)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	31. 	31. 
32	KECAMATAN DONRI-DONRI	32 Drs. NUR KHAMSI NIP. 19640728 199311 1 001 Pembina (IV / a)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	32. 	32. 
33	KECAMATAN GANRA	33 GUSNAWATI, S.Sos NIP. 19760421 199803 2 003 Penata Tk. I (III / d)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	33. 	33. 
34	KECAMATAN CITTA	34 AGUSNAWATI, SE NIP. 19730112 201001 2 004 Penata (III / c)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGGUNA BARANG	34. 	34. 

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK